

**LAPORAN**  
**PRAKTEK KERJA LAPANGAN**  
**PERANCANGAN SISTEM ABSENSI POLDA KALSEL DI BIDANG TIK**  
**BERBASIS WEBSITE**

**Oleh:**

**MOHAMAD REZA**

**2055201110040**



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN**  
**BANJARMASIN**

**2023**

## **DAFTAR ISI**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penting dalam perubahan lingkungan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama pada instansi pemerintahan. Polda Kalimantan Selatan adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan memiliki beberapa bidang yaitu, Direktorat Intelkam, Direktorat Reserve Narkoba, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Polisi Perairan dan Udara, Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk mendukung proses pemerintahan khususnya dalam penerapan sistem absensi untuk memantau kehadiran pegawai. Teknologi ini sedang diterapkan di Bidang TIK Polda Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan ASN dan meningkatkan kinerja ASN. Sistem absensi dengan cara ini juga dapat memaksimalkan waktu pekerjaan dalam suatu pemerintahan dibanding dengan memanggil nama satu per satu, hal ini dapat membuang waktu pekerjaan.

Absensi secara konvensional tidak relevan untuk diterapkan saat ini karena memiliki kekurangan seperti tidak efisien waktu dalam proses pelaksanaannya, memberikan kemungkinan besar untuk terjadinya kesalahan dalam proses pengumpulan data yang disebabkan oleh *human error*. Oleh sebab itu, penggunaan sistem absensi sangatlah diperlukan untuk memperbaharui absensi konvensional.

Pada era modern ini tidak menutup kemungkinan *smartphone* dapat digunakan untuk sistem absensi pemerintahan. Dikarenakan *smartphone* dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder untuk setiap orang karena fungsinya jauh lebih praktis dan efisien serta dengan kemajuan teknologi sudah seharusnya pemerintahan Polda Kalimantan Selatan Bidang TIK mempunyai sistem informasi tentang pegawainya khususnya kehadiran.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah membahas tentang “Bagaimana merancang sistem untuk absensi berbasis website pada Polda Kalimantan Selatan Bidang TIK”

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah pada perancangan sistem absensi Polda Kalimantan Selatan Bidang TIK adalah :

1. Sistem hanya mengolah absensi pegawai setiap harinya, yaitu absen hadir, izin, sakit dan absen pulang.

2. Validasi izin dan sakit dilakukan dengan pegawai memberikan informasi kepada admin melalui telepon, lalu admin mencatat bahwa si pegawai tidak bisa masuk.
3. Sistem absensi hanya bisa diakses dalam satu titik yaitu bidang TIK.
4. Laporan absensi dilakukan per bulan untuk menampilkan laporan pegawai yang mempunyai total hadir, izin, dan sakit.

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari perancangan sistem absensi ini adalah :

1. Untuk memudahkan pegawai dalam melakukan absensi.
2. Untuk mengurangi kecurangan saat melakukan absensi, misalnya menggunakan *Fake Location*.
3. Untuk memudahkan admin dalam pembuatan laporan bulanan.

Adapun manfaat perancangan sistem absensi ini adalah :

1. Memudahkan admin untuk analisa data kehadiran.
2. Hemat waktu serta meningkatkan produktivitas pegawai.
3. Membantu admin dalam memantau kinerja pegawainya.

#### **1.5 Metodologi**

Metode yang digunakan adalah interview, yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak yang bertugas mengelola data absensi, sehingga data yang dihasilkan dapat mewakili sistem absensi yang sesungguhnya.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah yang sedang dibahas, maka sistematika pembahasan sistem absensi Polda KalSel Bid TIK adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang dalam perancangan sistem absensi, rumusan masalah yang ingin diselesaikan dari sistem yang sudah ada, batasan masalah untuk sistem, tujuan dari merancang sistem absensi dan manfaat penggunaan sistem absensi, metodologi yang digunakan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini berisikan tentang identitas perusahaan, meliputi sejarah perusahaan, dasar sistem yang telah diterapkan, serta struktur organisasi perusahaan tersebut.

### **BAB III : ANALISA DAN DESAIN**

Dalam bab ini berisikan tentang tabel kegiatan pelaksanaan dan uraian kegiatan PKL, jenis model yang digunakan dan menjelaskan mengenai identifikasi masalah dan bagaimana sistem itu dibuat, dilanjutkan dengan perancangan sistem yang

meliputi *Entity Relationship Diagram* (ERD), *Conseptual Database*.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini pembahasan implementasi yang dilakukan, mulai dari bahasa pemrograman, software yang digunakan serta hasilnya.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari laporan, menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah serta saran yang dapat diberikan pengguna rancangan ini.

#### **1.7 Tempat dan Jadwal Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Polda Kalimantan Selatan yang beralamat di Jl. Bina Praja Utara, Timur Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjar baru, Kalimantan Selatan 70732.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **2.1 Sejarah Berdirinya Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan**

Dalam situasi politik yang tidak stabil pada tahun 1950-an, berpengaruh besar terhadap organisasi militer yang kemudian melahirkan kekacauan-kekacauan nasional. Beberapa kelompok separates bersenjata muncul di mana-mana. Saat itulah satuan-satuan Mobrig yang setia kepada republik ini secara aktif turut melakukan penumpasan dan pengamanan di berbagai daerah di tanah air. Dari rangkaian sejarali ini, terbentuk Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Pengabdian Mobrig dalam melaksanakan tugas negara tidak pernah surut. Sekitar tahun 1953, di Kalimantan Selatan, satuan Mobrig yang berasal dari kesatuan di Surabaya dikerahkan untuk memadamkan pemberontakan rakyat pimpinan Letnan Dua Ibnu Hajar, Komandan Pasukan Penggempur Divisi IV



ALRI di Kalimantan Selatan. Satuan Mobrig yang berasal dari kesatuan di Surabaya itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya Polda Kalsel.

Kekecewaan yang berulang-ulang telah membuat Ibnu Hajar pada bulan Oktober 1950 di Kalimantan Selatan membentuk Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRyT) dan menyatakan gerakannya sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (Nil) dengan wilayah pergerakannya di daerah Hulu Sungai sepanjang kawasan pegunungan Meratus pada wilayah Kalimantan Selatan. Selain kelompok Ibnu Hajar, ada juga kelompok yang dikenal dengan nama Gerakan Mandau Talawang Panca Sila (GMTPS), pimpinan Christian Simbar di sepanjang sungai Barito di wilayah Kalimantan Tengah. Gerakan Ibnu Hajar dengan KRyTnya dalam aksinya menggunakan takti perang gerilya. Aktivitas aksinya semakin meluas ke wilayah – wilayah Barabai, Birayang, Batumandi, Paringin, Kelua dan Kandangan.

Selain melalui kekuatan bersenjata, dalam menghadapi pemberontakan Ibnu Hajar, pemerintah pusat juga menggunakan pendekatan melalui tokoh – tokoh kharismatik lokal seperti Hasan Basery ( mantan komandan Ibnu Hajar ) dan Idham Khalid seorang politikus dari Nahdlatul Ulama (NU) untuk membujuk Ibnu Hajar dan KRyTnya agar meletakkan senjata dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Awalnya Ibnu Hajar bersedia untuk menyerahkan diri namun setelah menyerahkan diri Ibnu Hajar akhirnya melarikan diri dan melakukan pemberontakan kembali. Selanjutnya pemerintah melakukan tindakan yang tegas sehingga pada akhir tahun 1959 Ibnu Hajar beserta seluruh

pengikutnya tertangkap. Ibnu Hajar sendiri akhirnya di hukum mati pada tahun 1963.

Selama mengatasi pemberontakan Ibnu Hajar dan Simbar, berbagai peristiwa heroik terjadi. Salah satunya peristiwa tragis dan mengharukan bagi Bhayangkari Polda Kalsel. Pada 28 September 1953, Mathilda Batlayeri, seorang Bhayangkari gugur bersama ketiga anak dan janin dalam kandungannya pada saat membantu mempertahankan Pos / Asrama Polisi yang diserang oleh gerombolan KRYT.

Secara formal, bersamaan datangnya pasukan ‘ Mobrig, Kepolisian Kalimantan pada 1953 terbentuk dan berkedudukan pertama di Banjarmasin. Pada awalnya Polda Kalsel dikenal dengan sebutan Kepolisian Keresidenan Kalimantan, di mana pada saat itu Keresidenan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjadi satu dan berkedudukan di Banjarmasin. Baru pada 23 Mei 1957, Keresidenan Kalimantan Tengah resmi berdiri sendiri menjadi provinsi dengan ibukota Palangkaraya. Namun Kepolisian Kalimantan masih mencakup Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

Berdasar SK Perdana Menteri RI, tanggal 12 Januari 1959, sebutan untuk Kepolisian di Kalimantan yang semula Kepolisian Provinsi (KPPROP) Kalimantan, berubah menjadi Kepolisian Komisariat, (KPKOM). Sementara itu sebutan untuk Kepolisian Resort disingkat KPPRES, dimana pada waktu itu KPKOM Kalsel membawahi 7 KPPRES. Dan berdasar Keputusan Presiden RI tertanggal 12 April 1962, nama Kepolisian Negara kembali berubah

menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Menyusul perubahan tersebut, maka sebutan Kepala Kepolisian Negara (yang sekarang disebut Kapolri) berubah menjadi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia di singkat Menpangak.

Maka sejak itu juga sebutan Markas Besar AKRI di singkat MARAK. Sebutan untuk Kepolisian di tingkat Provinsi menjadi Komando Daerah Angkatan Kepolisian disingkat KOMDAK. Ditingkat Kabupaten di sebut Komando Resort Kepolisian (KOMRES), di tingkat Kecamatan di sebut Komando Sektor (KOMSEK) serta Komando Distrik atau KOMDIS. Sedangkan untuk Pimpinan Kepolisian di tingkat KOMDAK adalah Panglima Komando Daerah Angkatan Kepolisian disingkat Pangdak. KOMRES adalah Komandan Resort (Danres) dan di tingkat KOMSEK yaitu Dansek dan Dandis.

Sejak itulah Komdak XIII/Kalsel terbentuk. Pada 1962 terjadi musibah kebakaran yang menimpa Markas Komdak XIII/Kalsel dan menghancurkan seluruh bangunan beserta isinya. Pada Juli 1963, Ibnu Khajar dan pengikutnya menyerahkan diri di Desa Ambulun Hulu Sungai Selatan. Pada tahun yang sama juga, berdirilah Lembaga Pendidikan di Banjarbaru yang waktu itu bernama Sekolah Angkatan Kepolisian di singkat SAK (sekarang SPN).

Berdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab, maka pada 1974 dilakukan likuidasi antara Komdak XIII/Kalsel dengan Komdak XII/Kalteng menjadi satu komando dengan sebutan KOMDAK XIII/KALRA (Kalimantan Tenggara) dengan Brigjen Pol. Drs. R. Hardono sebagai Kadapol XIII/Kaira yang

pertama. Komdak XIII/Kaira yang berstatus tipe “B” itu membawahi 16 Komres dan 129 Komsek.

Sebutan Polda Kalselteng dimulai sejak reorganisasi Polri di tahun 1984. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pangab nomor: Kep/11/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992, terjadi likuidasi Polda Kalselteng menjadi Polda Kalsel dan Polda Kalteng yang realisasinya dilaksanakan pada penghujung tahun anggaran 1994/1995. Pemisahan ini ditandai dengan penyerahan Pataka Tunggal Dharma Visudha” untuk Polda Kalsel dan Pataka “Manunggal Dharma Carya Jaya” untuk Polda Kalteng. Maka resmi Polda Kalselteng di likuidasi. Namun akibatnya status Polda Kalsel yang sebelumnya tipe “B” dipimpin oleh seorang Brigjen, sejak likuidasi tersebut turun menjadi Tipe “C” dan di pimpin oleh seorang Kolonel.

Pada perkembangan berikutnya, berdasarkan keputusan Menhankam pada bulan Oktober 1999 –dikukuhkan pada 19 Oktober 1999 – status Polda Kalsel ditingkatkan kembali menjadi tipe “B” bersama-sama dengan Polda Kalbar, Polda Yogyakarta, Polda Sulut Polda Bali, Polda Aceh, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Polda Maluku. Seiring naiknya status maka dengan sendirinya Polda Kalsel kembali di Pimpin oleh seorang berpangkat Brigjen hingga sekarang.

Perubahan status Polda Kalsel dan lainnya itu sangat berkaitan dengan tuntutan di dalam tubuh Polri berkenaan dengan dan Polri pada tanggal 1 April 1999 yang kinerja Polri khususnya Polda Kalsel untuk dan proaktif.

## **2.2 Gambaran Umum Polda**

## **2.3 Struktur Organisasi**

## **2.4 Sistem Yang Sedang Berjalan**

## **2.5 Landasan Teori**

### **2.5.1 Perancangan**

Perancangan adalah sebuah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta didalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya.